KEPEMIMPINAN PENDIDIK SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Aghni Zazkia Azzahra [1], Nayla Fauziah [2], Aisyah Nur Laeli [3], Zahrina Naja Izzati [4], Fitrah Aditya Pratama [5], Khairunnisa [6], Siswadi[7]
[1-7]UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
[1] 254110406002@mhs.uinsaizu.ac.id, [2] 254110406033@mhs.uinsaizu.ac.id , [3] 254110406003@mhs.uinsaizu.ac.id, [4] 254110406047@mhs.uinsaizu.ac.id , [5] 254110406016@mhs.uinsaizu.ac.id , [6] 254110406022@mhs.uinsaizu.ac.id , [7] siswadi@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

Educators play a strategic role not only in the teaching and learning process but also in shaping students' values, social interactions, and social awareness. This role positions educators not merely as transmitters of knowledge but as agents of social change who influence how students understand themselves, society, and their social environment. This article aims to analyze educator leadership as an agent of social change from the perspective of the sociology of education. The study employs a qualitative approach using library research to examine literature on educational leadership, socialization, social reproduction, social capital, and critical pedagogy. The analysis involves thematic categorization, critical interpretation, and conceptual synthesis. The findings indicate that educator leadership as an agent of social change operates through role modeling, the development of learning cultures, critical consciousness, the management of social relationships, and the creation of inclusive educational environments. Durkheim's perspective explains the role of education in building social solidarity, Bourdieu's framework reveals how educational practices may reproduce inequality through cultural capital, while Freire emphasizes dialogue and critical consciousness as foundations for transformation. The synthesis of these perspectives suggests that educators can preserve constructive social values while critically challenging practices that perpetuate injustice. Therefore, educator leadership should promote participatory, reflective, and socially equitable learning environments.

Keywords: *educator leadership, agent of social change, sociology of education, critical consciousness, social justice.*

ABSTRAK

Pendidik memiliki peran strategis dalam proses pendidikan sekaligus dalam membentuk nilai, pola interaksi, dan kesadaran sosial peserta didik. Peran tersebut menempatkan pendidik bukan sekadar sebagai penyampai pengetahuan, melainkan sebagai agen perubahan sosial yang dapat memengaruhi cara peserta didik memahami diri, masyarakat, dan lingkungan kehidupannya. Artikel ini bertujuan menganalisis kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan sosial melalui perspektif sosiologi pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui penelaahan literatur mengenai kepemimpinan pendidikan, sosialisasi, reproduksi sosial, modal sosial, dan pendidikan kritis. Analisis dilakukan melalui pengelompokan tema, interpretasi kritis,

dan sintesis konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan sosial bekerja melalui keteladanan, pembentukan budaya belajar, pengembangan kesadaran kritis, pengelolaan relasi sosial, dan penciptaan lingkungan pendidikan yang inklusif. Perspektif Durkheim menjelaskan fungsi pendidikan dalam membangun solidaritas sosial, Bourdieu membantu mengungkap reproduksi ketimpangan melalui modal budaya, sedangkan Freire menekankan pentingnya dialog dan kesadaran kritis untuk mendorong perubahan. Sintesis ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa pendidik memiliki ruang untuk mempertahankan nilai sosial yang konstruktif sekaligus mengkritisi praktik yang melanggengkan ketidakadilan. Dengan demikian, kepemimpinan pendidik perlu diarahkan pada pembelajaran yang partisipatif, reflektif, dan berkeadilan sosial.

Kata kunci: kepemimpinan pendidik, agen perubahan sosial, sosiologi pendidikan, kesadaran kritis, keadilan sosial.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses sosial yang membentuk pengetahuan, nilai, sikap, dan cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga mempelajari norma, memahami perbedaan, membangun identitas, dan mengembangkan kesadaran mengenai kedudukannya dalam masyarakat. Karena itu, pendidikan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan penyampaian materi pelajaran. Pendidikan juga menjadi ruang berlangsungnya proses sosialisasi, pembentukan kebudayaan, dan perubahan hubungan sosial.

Dalam proses tersebut, pendidik memiliki posisi yang strategis. Pendidik berinteraksi langsung dengan peserta didik, mengelola pembelajaran, memberikan keteladanan, serta menentukan bagaimana perbedaan pendapat dan persoalan sosial dibicarakan di lingkungan pendidikan. Cara pendidik memperlakukan peserta didik, membagi kesempatan belajar, merespons perbedaan latar belakang, dan menyelesaikan konflik turut membentuk pengalaman sosial peserta didik. Dengan demikian, pengaruh pendidik tidak hanya terletak pada materi yang diajarkan, tetapi juga pada nilai dan pola hubungan yang dibangun melalui praktik pendidikan sehari-hari.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, kedudukan pendidik tersebut dapat dijelaskan melalui hubungan antara individu, institusi pendidikan, dan struktur masyarakat. Durkheim (1956) memandang

pendidikan sebagai proses sosial yang membantu membentuk nilai bersama dan mempersiapkan individu untuk hidup dalam masyarakat. Pemikiran ini menegaskan bahwa pendidik berperan dalam membangun kedisiplinan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Namun, fungsi pendidikan tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Nilai yang ditanamkan di sekolah juga perlu diperiksa secara kritis agar pembentukan keteraturan sosial tidak menghilangkan ruang bagi perbedaan, kebebasan berpikir, dan perubahan yang diperlukan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika pendidikan berhadapan dengan ketimpangan sosial. Peserta didik datang ke lembaga pendidikan dengan latar belakang ekonomi, budaya, bahasa, dan pengalaman keluarga yang berbeda. Perbedaan itu dapat memengaruhi akses terhadap sumber belajar, kepercayaan diri, partisipasi di kelas, dan kesempatan memperoleh prestasi. Bourdieu dan Passeron (1977) menunjukkan bahwa sistem pendidikan dapat ikut mereproduksi ketimpangan apabila budaya kelompok tertentu diperlakukan sebagai standar keberhasilan, sementara pengalaman kelompok lain kurang dihargai. Dalam konteks ini, pendidik perlu memahami bahwa perlakuan yang tampak sama belum tentu menghasilkan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik.

Kepemimpinan pendidik karena itu tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan mengendalikan kelas atau memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana. Kepemimpinan juga mencakup kemampuan membangun relasi yang setara, membuka ruang dialog, mendorong partisipasi, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama. Spillane (2006) menjelaskan kepemimpinan sebagai praktik yang terbentuk melalui interaksi antara pemimpin, anggota organisasi, dan situasi. Perspektif ini membantu memahami bahwa perubahan pendidikan tidak hanya dihasilkan oleh keputusan individual pendidik, tetapi juga melalui hubungan dan praktik bersama di lingkungan sekolah.

Freire (2000) memberikan dasar penting bagi pemahaman pendidik sebagai agen perubahan melalui konsep pendidikan kritis. Pendidikan seharusnya tidak menempatkan peserta didik sebagai penerima informasi yang pasif, melainkan

sebagai subjek yang mampu mempertanyakan pengalaman, memahami realitas, dan terlibat dalam perubahan. Dalam praktik pembelajaran, pandangan tersebut dapat diwujudkan melalui diskusi yang memberi ruang bagi perbedaan pendapat, pembelajaran berbasis masalah sosial, dan kegiatan refleksi yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. Pendidik tidak harus memberikan jawaban atas setiap persoalan, tetapi perlu membantu peserta didik mengembangkan kemampuan menilai persoalan berdasarkan alasan dan bukti.

Perkembangan masyarakat digital juga memperluas tantangan kepemimpinan pendidik. Arus informasi, perubahan pola komunikasi, dan interaksi di media sosial memengaruhi cara peserta didik membentuk pandangan mengenai identitas, keberhasilan, otoritas, serta hubungan dengan orang lain. Pendidik dituntut tidak hanya menguasai teknologi pembelajaran, tetapi juga membantu peserta didik memahami tanggung jawab sosial dalam menggunakan informasi dan berkomunikasi di ruang digital. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, Siswadi (2024) membahas pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi perubahan era digital. Perspektif tersebut relevan untuk menempatkan pendidik sebagai pelaku pendidikan yang perlu menyesuaikan pendekatan tanpa kehilangan orientasi nilai dan tujuan pembelajaran.

Rumah Jurnal STKIP Subang+1

Kajian Siswadi dan Muflih Nurriza Pahlawi (2025) mengenai pengembangan kepemimpinan berbasis modal sosial juga memberikan pijakan untuk memahami pentingnya kepercayaan, jejaring, dan hubungan sosial dalam pengelolaan pendidikan. Modal sosial tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pimpinan dan anggota lembaga, tetapi juga dengan kemampuan membangun kerja sama yang mendukung proses belajar dan pengembangan peserta didik. Dalam konteks pendidik, hubungan yang dilandasi kepercayaan dapat memperkuat komunikasi dengan peserta didik, keluarga, rekan kerja, dan masyarakat.

Meskipun demikian, pendidik tidak dapat dipandang sebagai agen perubahan yang bekerja di luar pengaruh struktur sosial. Kebijakan

kurikulum, budaya organisasi, ketersediaan sumber daya, beban administratif, dan pola relasi di sekolah dapat memperluas atau membatasi ruang gerak pendidik. Karena itu, analisis mengenai kepemimpinan pendidik perlu menghindari anggapan bahwa seluruh persoalan pendidikan dapat diselesaikan hanya melalui keteladanan atau komitmen individual. Perubahan sosial dalam pendidikan memerlukan hubungan antara kapasitas pendidik, dukungan kelembagaan, dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan utama: bagaimana kepemimpinan pendidik dapat dipahami sebagai agen perubahan sosial; bagaimana praktik kepemimpinan pendidik berhubungan dengan sosialisasi, reproduksi sosial, dan kesadaran kritis; serta kondisi apa yang mendukung pendidik dalam membangun perubahan sosial melalui pendidikan. Tujuan kajian ini adalah menyusun pemahaman konseptual yang menghubungkan teori sosiologi pendidikan dengan praktik kepemimpinan pendidik dalam pembelajaran dan kehidupan kelembagaan.

Kontribusi artikel terletak pada sintesis tiga perspektif, yaitu pendidikan sebagai pembentuk solidaritas sosial, pendidikan sebagai ruang reproduksi maupun negosiasi ketimpangan, dan pendidikan sebagai proses pembentukan kesadaran kritis. Sintesis tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa pendidik tidak hanya berperan mempertahankan nilai yang telah berlaku, tetapi juga dapat mendorong perubahan ketika nilai dan praktik yang ada bertentangan dengan prinsip keadilan, penghargaan terhadap perbedaan, dan perkembangan peserta didik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode tersebut dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah dan menyintesiskan pemikiran teoretis mengenai kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan sosial dalam perspektif sosiologi pendidikan. Kajian tidak dimaksudkan untuk mengukur pengaruh antarvariabel atau melaporkan hasil observasi lapangan, melainkan untuk mengembangkan

argumentasi konseptual berdasarkan literatur yang relevan.

Sumber kajian meliputi buku akademik dan artikel jurnal yang membahas sosiologi pendidikan, kepemimpinan pendidikan, reproduksi sosial, modal sosial, pendidikan kritis, dan perubahan sosial. Literatur utama mencakup pemikiran Durkheim mengenai fungsi sosial pendidikan, Bourdieu dan Passeron mengenai reproduksi sosial, Freire mengenai pendidikan kritis, serta kajian kepemimpinan yang menjelaskan hubungan antara praktik pemimpin, anggota organisasi, dan lingkungan kelembagaan. Publikasi Siswadi pada tahun 2023–2026 digunakan sebagai literatur pendukung dalam pembahasan kepemimpinan pendidikan, adaptasi terhadap perubahan, keteladanan, dan modal sosial.

Pemilihan sumber didasarkan pada kesesuaian dengan fokus kajian, kejelasan identitas publikasi, serta kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian. Analisis dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, penelusuran dan seleksi literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Kedua, pengelompokan sumber ke dalam tema fungsi sosial pendidikan, reproduksi ketimpangan, kepemimpinan pendidik, kesadaran kritis, dan perubahan sosial. Ketiga, interpretasi kritis dengan membandingkan gagasan dari berbagai perspektif untuk mengidentifikasi keterkaitan dan ketegangannya. Keempat, sintesis konseptual untuk merumuskan hubungan antara praktik kepemimpinan pendidik, proses sosial dalam pendidikan, dan kemungkinan perubahan sosial.

Untuk menjaga ketepatan interpretasi, teori dibedakan dari hasil penelitian empiris yang dilaporkan dalam literatur. Gagasan teoretis digunakan sebagai perangkat analisis, bukan sebagai bukti langsung bahwa suatu praktik telah menghasilkan perubahan pada lembaga tertentu. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini berupa sintesis konseptual dari literatur yang ditelaah, bukan temuan empiris mengenai perilaku pendidik di sekolah tertentu.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kepemimpinan Pendidik dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan

Kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan sosial berangkat dari pemahaman bahwa kegiatan

pendidikan selalu berlangsung dalam lingkungan sosial tertentu. Pendidik tidak hanya mengatur proses pembelajaran, tetapi juga membangun pola interaksi yang memengaruhi cara peserta didik memahami aturan, menghargai orang lain, menyelesaikan persoalan, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, kepemimpinan pendidik perlu dilihat melalui tindakan pedagogis sekaligus dampak sosial dari tindakan tersebut.

Durkheim (1956) menjelaskan bahwa pendidikan berperan mempersiapkan individu agar mampu hidup dalam masyarakat. Melalui pendidikan, nilai dan norma sosial diteruskan kepada generasi berikutnya sehingga terbentuk keteraturan dan solidaritas. Dalam konteks ini, pendidik berperan membantu peserta didik memahami tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kepentingan bersama. Akan tetapi, pembentukan nilai sosial tidak seharusnya dilakukan melalui kepatuhan tanpa pemahaman. Pendidik perlu membantu peserta didik memahami alasan di balik aturan dan menilai penerapannya secara proporsional.

Sebagai contoh, disiplin di kelas tidak cukup diwujudkan melalui hukuman terhadap pelanggaran. Pendidik dapat mengajak peserta didik menyepakati aturan, memahami konsekuensi tindakan, dan merefleksikan pengaruh perilaku individu terhadap kenyamanan belajar bersama. Proses tersebut mengubah disiplin dari sekadar kepatuhan terhadap otoritas menjadi tanggung jawab sosial. Dengan demikian, nilai yang dipelajari tidak berhenti pada pengetahuan normatif, tetapi diterapkan dalam hubungan sehari-hari.

Namun, pendidikan juga dapat mempertahankan ketimpangan. Bourdieu dan Passeron (1977) menjelaskan bahwa institusi pendidikan dapat mereproduksi struktur sosial melalui mekanisme yang membuat budaya kelompok tertentu lebih diakui daripada budaya kelompok lainnya. Peserta didik yang telah terbiasa dengan bahasa akademik, sumber bacaan, dan pola komunikasi yang dihargai sekolah mungkin memiliki keuntungan dibandingkan peserta didik yang tidak memperoleh pengalaman serupa di rumah.

Dalam kondisi demikian, kepemimpinan pendidik membutuhkan kepekaan sosiologis. Pendidik perlu memahami bahwa perbedaan kemampuan berpartisipasi tidak selalu menunjukkan perbedaan motivasi atau kecerdasan. Peserta didik yang jarang berbicara, misalnya, belum tentu tidak memahami materi. Mereka mungkin belum terbiasa menyampaikan pendapat di ruang publik atau merasa kurang percaya diri ketika berhadapan dengan teman yang lebih dominan. Pendidik yang peka akan menyediakan beragam kesempatan berpartisipasi, seperti diskusi kelompok kecil, penulisan refleksi, presentasi berpasangan, dan pemberian tanggapan secara bertahap.

Perbedaan pandangan Durkheim dan Bourdieu memberikan pelajaran penting. Pendidikan memang diperlukan untuk membangun keteraturan sosial, tetapi keteraturan tersebut perlu diperiksa agar tidak mengukuhkan ketidakadilan. Kepemimpinan pendidik menjadi bermakna ketika mampu menjaga nilai bersama sekaligus membuka ruang untuk mengkritisi norma dan praktik yang merugikan kelompok tertentu. Dengan kata lain, pendidik bukan hanya pelaksana nilai sosial yang telah ada, melainkan juga pihak yang dapat membantu masyarakat meninjau kembali nilai tersebut.

2. Pendidik sebagai Agen Sosialisasi dan Pembentukan Budaya Sosial

Sosialisasi merupakan proses ketika individu mempelajari nilai, norma, kebiasaan, dan pola perilaku yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Sekolah menjadi salah satu ruang penting dalam proses tersebut karena peserta didik berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda. Pendidik memiliki pengaruh melalui materi pembelajaran, aturan kelas, pola komunikasi, penilaian, dan keteladanan yang ditampilkan secara konsisten.

Bandura (1977) menjelaskan pentingnya pembelajaran melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa tindakan pendidik dapat menjadi sumber pembelajaran sosial. Pendidik yang menunjukkan sikap adil, mendengarkan pendapat, mengakui kesalahan, dan menyelesaikan konflik secara terbuka memberikan contoh perilaku yang dapat diamati peserta

didik. Sebaliknya, apabila pendidik meminta peserta didik menghormati perbedaan tetapi mempermalukan mereka yang memiliki pandangan berbeda, terdapat ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan dan praktik yang diperlihatkan.

Budaya sosial di lingkungan pendidikan terbentuk melalui pengulangan tindakan dan interaksi. Karena itu, keteladanan tidak cukup dilakukan dalam kegiatan seremonial, tetapi perlu hadir dalam keputusan sehari-hari. Pembagian kesempatan berbicara, pemberian umpan balik, penanganan pelanggaran, dan penghargaan terhadap kontribusi peserta didik merupakan bagian dari proses pembentukan budaya tersebut.

Lickona (1991) menekankan keterkaitan antara pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Dalam konteks kepemimpinan pendidik, pembentukan karakter perlu melampaui penyampaian definisi mengenai kejujuran, tanggung jawab, atau kepedulian. Peserta didik perlu memperoleh kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam situasi nyata, memahami akibat tindakannya, dan memperbaiki perilaku ketika terjadi kesalahan.

Meski demikian, sosialisasi bukan proses satu arah. Peserta didik juga membawa pengalaman keluarga, kelompok pertemanan, budaya lokal, dan lingkungan digital ke dalam ruang kelas. Pendidik perlu memahami pengalaman tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ketika muncul perbedaan pandangan, pendekatan dialogis lebih memungkinkan peserta didik menjelaskan alasan dan mempertimbangkan perspektif lain dibandingkan pendekatan yang hanya menuntut penerimaan terhadap pendapat pendidik.

Dengan demikian, kepemimpinan pendidik dalam sosialisasi berlangsung melalui dua proses. Pertama, menanamkan nilai yang mendukung kehidupan bersama, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan penghargaan terhadap orang lain. Kedua, membantu peserta didik menafsirkan nilai tersebut secara kritis sesuai konteks. Kedua proses ini perlu berjalan seimbang agar pendidikan mampu membangun integrasi sosial tanpa menghilangkan kemampuan berpikir mandiri.

3. Kepemimpinan Pendidik dalam Mengembangkan Kesadaran Kritis

Perubahan sosial tidak hanya membutuhkan individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, tetapi juga individu yang dapat mengenali persoalan dan mempertimbangkan kemungkinan perbaikannya. Freire (2000) menempatkan dialog dan kesadaran kritis sebagai bagian penting dari pendidikan yang membebaskan. Pendidikan tidak seharusnya memperlakukan peserta didik sebagai wadah kosong yang hanya menerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek yang mampu menghubungkan pengalaman dengan proses berpikir.

Pandangan ini memberikan dasar bagi pendidik untuk mengembangkan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan persoalan sosial. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, misalnya, peserta didik dapat mendiskusikan kesenjangan akses pendidikan, perubahan lingkungan, kemiskinan, atau hubungan antara perkembangan teknologi dan kehidupan masyarakat. Pembahasan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh peserta didik pada satu kesimpulan, melainkan melatih mereka mengenali masalah, menguji informasi, membandingkan perspektif, dan menyusun argumentasi.

Giroux (1988) juga menekankan pentingnya pendidik sebagai intelektual yang berperan dalam membentuk praktik pendidikan dan kehidupan demokratis. Dalam perspektif ini, pendidik tidak cukup menjalankan kurikulum secara mekanis. Pendidik perlu memahami tujuan sosial pembelajaran dan mempertimbangkan apakah praktik yang digunakan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, bertanya, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Kesadaran kritis juga berkaitan dengan kemampuan mengenali ketidakadilan dalam interaksi sehari-hari. Ejekan berdasarkan kondisi ekonomi, stereotip terhadap kelompok tertentu, pembagian tugas yang tidak seimbang, atau pengucilan dalam pergaulan dapat menjadi bahan refleksi pendidikan. Pendidik perlu menanganinya dengan pendekatan yang melindungi peserta didik, menjelaskan dampak perilaku, dan membangun mekanisme penyelesaian yang adil. Persoalan sosial tidak cukup diselesaikan melalui teguran sesaat jika pola

interaksi yang melatarbelakanginya tetap berlangsung.

Meski demikian, pendidikan kritis tidak berarti pendidik harus menjadikan kelas sebagai ruang pertentangan tanpa batas. Dialog perlu disertai aturan yang melindungi peserta didik, penghormatan terhadap perbedaan, dan penggunaan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidik berperan menjaga agar kritik diarahkan pada gagasan, kebijakan, dan tindakan, bukan pada penghinaan terhadap individu atau kelompok.

Dalam kaitannya dengan kepemimpinan, kemampuan mengembangkan kesadaran kritis menuntut pendidik bersedia mengevaluasi praktiknya sendiri. Pendidik perlu mempertanyakan apakah metode pembelajaran telah memberi kesempatan yang memadai bagi seluruh peserta didik, apakah penilaian dilakukan secara adil, dan apakah aturan kelas diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, perubahan sosial tidak hanya diarahkan kepada peserta didik atau masyarakat, tetapi juga mencakup perubahan dalam praktik pendidik dan budaya lembaga pendidikan.

4. Modal Sosial dan Kolaborasi sebagai Dasar Perubahan Sosial

Kepemimpinan pendidik tidak berlangsung secara terpisah dari hubungan dengan rekan kerja, keluarga, dan masyarakat. Perubahan sosial melalui pendidikan membutuhkan dukungan lingkungan yang memungkinkan nilai dan kebiasaan positif diterapkan secara konsisten. Coleman (1988) menjelaskan modal sosial melalui fungsi hubungan sosial yang dapat memfasilitasi tindakan individu. Putnam (2000) juga menekankan peran jaringan, kepercayaan, dan norma timbal balik dalam mendukung kerja sama.

Dalam lingkungan pendidikan, modal sosial dapat tumbuh melalui komunikasi yang terbuka antara pendidik dan peserta didik, kerja sama antarpendidik, hubungan dengan keluarga, serta keterlibatan komunitas. Hubungan tersebut menyediakan ruang untuk berbagi informasi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi, jaringan sosial tidak selalu bersifat inklusif. Kelompok yang memiliki hubungan lebih kuat dapat memperoleh akses lebih besar dibandingkan pihak yang kurang terhubung. Karena itu, pendidik perlu

memastikan bahwa kolaborasi tidak hanya menguntungkan kelompok yang telah memiliki kedekatan dengan lembaga.

Kajian Siswadi dan Muflih Nurriza Pahlawi (2025) mengenai kepemimpinan berbasis modal sosial menempatkan penguatan jejaring dan kepercayaan sebagai aspek penting dalam pengembangan kepemimpinan pendidikan. Relevansinya bagi pendidik terletak pada kemampuan membangun hubungan yang memungkinkan proses pembelajaran didukung oleh lingkungan sosial yang lebih luas. Sementara itu, Siswadi, Afandi, Mukroji, Sulistyawan, dan Sofati (2026) membahas strategi kepemimpinan berbasis modal sosial dalam membangun budaya mutu pendidikan, termasuk kolaborasi internal dan pelibatan orang tua. Kerangka ini dapat menjadi dasar untuk memahami bahwa perubahan sosial melalui pendidikan memerlukan hubungan yang terorganisasi, bukan hanya inisiatif individual.

Kolaborasi dengan keluarga, misalnya, dapat membantu pendidik memahami kondisi peserta didik di luar sekolah. Informasi mengenai kebiasaan belajar, tanggung jawab keluarga, atau hambatan akses dapat digunakan untuk merancang dukungan yang lebih sesuai. Di sisi lain, pendidik dapat menjelaskan kebutuhan pembelajaran dan membantu keluarga memahami cara mendukung perkembangan anak tanpa mengambil alih seluruh tanggung jawab pendidikan.

Hubungan dengan masyarakat juga membuka peluang untuk menghubungkan pembelajaran dengan persoalan nyata. Komunitas lingkungan, pelaku usaha, lembaga sosial, dan tokoh lokal dapat menjadi sumber pengalaman belajar. Peserta didik dapat mempelajari persoalan lingkungan melalui kegiatan komunitas, memahami perubahan ekonomi melalui wawancara dengan pelaku usaha, atau mengembangkan kepedulian sosial melalui kegiatan pelayanan masyarakat yang dirancang secara edukatif.

Namun, kolaborasi harus memiliki tujuan yang jelas. Keterlibatan masyarakat tidak otomatis menjadi perubahan sosial apabila hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Pendidik perlu menghubungkan kegiatan bersama dengan tujuan pembelajaran, refleksi peserta didik, dan evaluasi manfaat. Dengan demikian, modal sosial berfungsi

sebagai sarana memperluas pengalaman belajar dan mengembangkan tanggung jawab sosial, bukan sekadar memperbanyak hubungan kelembagaan.

5. Keteladanan, Kepemimpinan Adaptif, dan Perubahan dalam Era Digital

Perubahan teknologi telah memengaruhi pola komunikasi, akses informasi, dan pembentukan identitas sosial peserta didik. Lingkungan digital memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menghadirkan persoalan seperti penyebaran informasi yang keliru, perundungan daring, pelanggaran privasi, dan interaksi yang tidak menghargai perbedaan. Kondisi tersebut menuntut pendidik mengembangkan kepemimpinan yang adaptif sekaligus berlandaskan tanggung jawab sosial.

Siswadi (2024) membahas kepemimpinan pendidikan adaptif dalam menghadapi era digital, sedangkan Siswadi (2024) dalam kajian mengenai kepemimpinan pendidikan berbasis uswatun hasanah menekankan keteladanan sebagai pendekatan penguatan karakter. Kedua perspektif tersebut dapat dipertemukan dalam gagasan bahwa adaptasi teknologi perlu disertai konsistensi nilai. Pendidik perlu mengikuti perubahan cara belajar, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab dalam menjaga integritas, menghormati perbedaan, dan melindungi peserta didik.

Keteladanan di ruang digital dapat diwujudkan melalui kebiasaan memeriksa kebenaran informasi, mencantumkan sumber, menghargai karya orang lain, dan menggunakan bahasa yang bertanggung jawab. Ketika peserta didik membawa informasi yang belum terverifikasi ke dalam kelas, pendidik dapat menjadikannya kesempatan untuk melatih literasi informasi, bukan sekadar memberikan penilaian benar atau salah. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami proses pemeriksaan informasi dan alasan pentingnya tanggung jawab dalam komunikasi publik.

Kepemimpinan adaptif juga berarti menyesuaikan metode dengan kebutuhan peserta didik tanpa kehilangan tujuan pendidikan. Penggunaan teknologi tidak otomatis menjadikan pembelajaran lebih inklusif apabila sebagian peserta didik tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Pendidik perlu menyediakan alternatif kegiatan dan

memastikan bahwa perbedaan akses tidak memperbesar ketimpangan belajar.

Dalam konteks perubahan sosial, teknologi sebaiknya digunakan untuk memperluas partisipasi dan akses terhadap pengetahuan. Peserta didik dapat berkolaborasi dalam proyek sosial, mendokumentasikan persoalan lingkungan, atau mengembangkan materi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, kegiatan tersebut tetap membutuhkan pendampingan agar penggunaan teknologi berlangsung aman, etis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Dengan demikian, kepemimpinan pendidik di era digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat pembelajaran. Kepemimpinan tersebut mencakup kemampuan membaca perubahan sosial, menilai konsekuensi teknologi, dan membimbing peserta didik agar mampu menggunakan pengetahuan untuk kepentingan bersama. Keteladanan menjadi penghubung antara kemampuan adaptasi dan tanggung jawab sosial.

6. Hambatan Struktural dan Batas Peran Pendidik sebagai Agen Perubahan

Pendidik memiliki peluang untuk mendorong perubahan sosial, tetapi peluang tersebut dibatasi oleh kondisi kelembagaan dan struktur masyarakat. Beban administratif, keterbatasan fasilitas, ketidaksesuaian kebijakan, ukuran keberhasilan yang terlalu menekankan capaian akademik, dan budaya organisasi yang kurang terbuka dapat mengurangi kesempatan pendidik mengembangkan pembelajaran partisipatif. Karena itu, persoalan perubahan sosial tidak tepat jika seluruh tanggung jawabnya dibebankan kepada pendidik secara individual.

Freire (2000) menekankan pentingnya hubungan antara refleksi dan tindakan dalam proses perubahan. Dalam konteks pendidikan, pendidik dapat mengidentifikasi persoalan pembelajaran dan mencoba memperbaiki praktik yang berada dalam kewenangannya. Namun, persoalan yang membutuhkan perubahan kebijakan, anggaran, atau tata kelola lembaga memerlukan dukungan pihak lain. Kemampuan pendidik mendorong perubahan perlu dihubungkan dengan mekanisme

pengambilan keputusan dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Ketimpangan sosial juga dapat membatasi hasil dari praktik pendidikan. Sekolah yang memiliki fasilitas dan dukungan keluarga lebih besar mungkin lebih mudah mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis proyek daripada sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Perbedaan tersebut perlu diperhitungkan ketika menilai keberhasilan pendidik. Praktik kepemimpinan yang baik penting, tetapi tidak dapat menggantikan kebutuhan terhadap sumber daya dan kebijakan yang mendukung pemerataan kesempatan belajar.

Di sisi lain, pendidik juga perlu menghindari anggapan bahwa seluruh tradisi sosial harus dipertahankan atau seluruh perubahan selalu membawa kemajuan. Beberapa nilai lokal dapat memperkuat solidaritas dan kepedulian, sedangkan praktik lainnya mungkin perlu ditinjau kembali karena membatasi kesempatan kelompok tertentu. Tugas pendidik adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami konteks, mempertimbangkan bukti, dan menilai dampak suatu praktik terhadap kehidupan bersama.

Oleh karena itu, kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan perlu didukung oleh tiga kondisi. Pertama, kompetensi pedagogis dan sosiologis yang membantu pendidik memahami keragaman peserta didik. Kedua, budaya kelembagaan yang memungkinkan dialog, refleksi, dan kolaborasi. Ketiga, kebijakan yang memberi ruang bagi inovasi pembelajaran dan menyediakan dukungan yang dibutuhkan. Ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat digantikan hanya oleh keteladanan pribadi.

7. Sintesis Konseptual: Model Kepemimpinan Pendidik sebagai Agen Perubahan Sosial

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan sosial dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah pembentukan nilai dan solidaritas sosial, yang berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam menanamkan tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, dan penghargaan terhadap orang lain. Dimensi kedua adalah refleksi kritis terhadap struktur sosial, yaitu

kemampuan mengenali ketimpangan, menilai praktik yang tidak adil, dan membuka kesempatan belajar yang lebih setara. Dimensi ketiga adalah kolaborasi dan tindakan transformatif, yaitu kemampuan menghubungkan pembelajaran dengan persoalan sosial serta membangun kerja sama untuk memperbaiki lingkungan.

Ketiga dimensi tersebut tidak berjalan secara terpisah. Pembentukan nilai tanpa refleksi kritis berisiko menghasilkan kepatuhan tanpa pemahaman. Sebaliknya, kritik sosial tanpa tanggung jawab dan dialog dapat berubah menjadi pertentangan yang tidak menghasilkan penyelesaian. Sementara itu, kolaborasi tanpa kejelasan tujuan berpotensi berhenti pada kegiatan simbolis. Kepemimpinan pendidik perlu menghubungkan ketiganya melalui praktik pembelajaran yang konsisten dan relevan dengan kehidupan peserta didik.

Secara konseptual, kerangka tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Landasan Sosiologi Pendidikan

Sosialisasi dan solidaritas sosial • Reproduksi sosial • Kesadaran kritis

↓

Praktik Kepemimpinan Pendidik

Keteladanan • Pembelajaran dialogis • Pengelolaan relasi sosial • Kolaborasi

↓

Arah Perubahan Sosial

Tanggung jawab sosial • Partisipasi • Penghargaan terhadap perbedaan • Kesempatan belajar yang lebih adil

↓

Refleksi dan evaluasi berkelanjutan menghubungkan hasil pembelajaran dengan perbaikan praktik pendidik dan lingkungan pendidikan.

Kerangka tersebut merupakan sintesis konseptual dari literatur, bukan model yang telah diuji melalui penelitian lapangan. Kontribusinya terletak pada upaya menghubungkan tiga fungsi kepemimpinan pendidik yang sering dibahas secara terpisah: membentuk nilai sosial, mengkritisi ketimpangan, dan menggerakkan tindakan bersama. Kerangka ini menegaskan bahwa perubahan sosial melalui pendidikan bukan hanya perubahan sikap individual, tetapi juga perubahan dalam pola interaksi, kesempatan berpartisipasi, dan cara lembaga pendidikan merespons kebutuhan masyarakat.

Implikasi praktisnya adalah pendidik perlu menilai keberhasilan kepemimpinannya tidak hanya melalui ketercapaian materi atau ketertiban kelas. Pendidik juga perlu memperhatikan kualitas interaksi, pemerataan kesempatan berbicara, kemampuan peserta didik memberikan alasan, sikap terhadap perbedaan, serta keterlibatan dalam pemecahan masalah bersama. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi, bukan sebagai ukuran kuantitatif yang telah terbukti valid dalam penelitian ini.

Dengan demikian, kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan sosial merupakan proses yang berlangsung melalui tindakan sehari-hari sekaligus keterlibatan dalam perbaikan kelembagaan. Pendidik tidak bekerja sendirian, tetapi membangun perubahan melalui hubungan dengan peserta didik, rekan kerja, keluarga, dan masyarakat. Perubahan yang diharapkan bukan sekadar menghasilkan peserta didik yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, melainkan individu yang dapat berpartisipasi secara bertanggung jawab dan ikut memperbaiki kehidupan sosial.

D. Kesimpulan

Kepemimpinan pendidik sebagai agen perubahan sosial menunjukkan bahwa peran pendidik tidak terbatas pada penyampaian pengetahuan dan pengelolaan pembelajaran. Pendidik juga berperan membentuk nilai, mengembangkan kesadaran sosial, mengelola hubungan antarpeserta didik, dan membuka ruang bagi perubahan praktik yang tidak adil. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, peran tersebut berkaitan dengan fungsi pendidikan dalam membangun solidaritas sosial, proses reproduksi ketimpangan, serta pengembangan kesadaran kritis.

Sintesis pemikiran Durkheim, Bourdieu, dan Freire memperlihatkan bahwa pendidikan menghadapi tiga tuntutan yang saling berkaitan: membangun nilai bersama, mengenali ketimpangan yang memengaruhi kesempatan belajar, dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menilai serta memperbaiki realitas sosial. Pendidik perlu menyeimbangkan ketiganya melalui keteladanan, pembelajaran dialogis, perlakuan yang adil, dan pengembangan partisipasi peserta didik. Perubahan sosial juga membutuhkan dukungan lingkungan

pendidikan, keluarga, masyarakat, dan kebijakan kelembagaan.

Kontribusi konseptual artikel ini terletak pada kerangka yang menghubungkan pembentukan nilai dan solidaritas, refleksi kritis terhadap struktur sosial, serta kolaborasi dalam tindakan transformatif. Kerangka tersebut menempatkan kepemimpinan pendidik sebagai proses pedagogis sekaligus sosial yang berlangsung melalui praktik sehari-hari dan hubungan kelembagaan. Karena penelitian ini berbasis studi pustaka, kerangka yang dirumuskan masih perlu dikaji melalui penelitian empiris untuk memahami penerapannya dalam konteks sekolah yang berbeda. Penelitian selanjutnya dapat menelaah bagaimana praktik kepemimpinan pendidik memengaruhi partisipasi peserta didik, budaya inklusif, dan kemampuan lembaga pendidikan merespons ketimpangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Apple, M. W. (2004). Ideology and curriculum (3rd ed.). RoutledgeFalmer.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1977). Reproduction in education, society and culture. SAGE Publications.

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, S95–S120. https://doi.org/10.1086/228943

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan.

Durkheim, É. (1956). Education and sociology. Free Press.

Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.; M. B. Ramos, Trans.). Continuum. (Karya asli diterbitkan tahun 1970).

Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. University of California Press.

Giroux, H. A. (1988). Teachers as intellectuals: Toward a critical pedagogy of learning. Bergin & Garvey.

Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. Bantam Books.

Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and practice (9th ed.). SAGE Publications.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.

Siswadi. (2023). Islamic humble leadership in sustaining education quality at Madrasa.

Journal of Namibian Studies: History Politics Culture, 34(6), 2889–2911.

Siswadi. (2024). Mengurai problematika masa depan kepemimpinan pendidikan adaptif di era digital. PENDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(2), 200–210.

Siswadi. (2024). Kepemimpinan pendidikan berbasis uswatun hasanah: Menjadikan kepala sekolah sebagai role model karakter di era digital. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD), 4(3). https://doi.org/10.55606/jurdikbud.v4i3.11137

Siswadi, S., & Pahlawi, M. N. (2025). Pengembangan kepemimpinan berbasis modal sosial dalam konteks pendidikan: Sebuah tinjauan literatur. J-PGMI: Jurnal Pendidikan Guru MI, 8(2), 119–128. https://doi.org/10.24090/j-pgmi.v8i2.15629

Siswadi, S., Afandi, R., Mukroji, M., Sulistyawan, G. D., & Sofati, S. (2026). Strategi kepemimpinan berbasis modal sosial dalam membangun budaya mutu pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan, 11(1), 1450–1456. https://doi.org/10.34125/jmp.v11i1.1945

Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. Jossey-Bass.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press.